

























LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI **KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHUN 2023 TAHAP II KABUPATEN MALANG**

(SMART CITY) TAHUN 2023



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jakarta, 4 Desember 2023

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1384/DJAI/AI.01.04/12/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tahap II

Tahun 2023 untuk 141 Kota/Kabupaten

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1004/DJAI/AI.01.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

- 1. Dari seratus empat puluh satu (141) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) periode 2017-2021 terdapat seratus tiga puluh (130) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (self-assessment) online melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 2-16 November 2023. Sedangkan terdapat sebelas (11) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (self-assessment) online dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);
- Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (smart city) pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2019 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. Baseline (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*;



- c. Impact (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program smart city, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan;
- d. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah; dan
- e. Program Percepatan atau Quick Win (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi program percepatan smart city, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (Quick Win).
- 3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (smart city) yang berada pada enam puluh enam (66) kota/kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, berdasarkan enam (6) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni: Baseline (bobot 10%), Output (bobot 20%), Impact (bobot 20%), Outcome (bobot 20%), Program Percepatan atau Quick Win (bobot 20%), dan penilaian program kolaborasi (bobot 10%). Adapun program kolaborasi, mencakup jumlah program inovasi yang dilakukan secara mandiri oleh kota/kabupaten, dan atau berkolaborasi dengan kota/kabupaten lainnya pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru
- 4. Hasil penilaian dari berbagai dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:
 - a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (performance) merupakan tingkat pembangunan smart city dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata Baseline, Output, Outcome, Impact, dan Quick Win: dan
 - b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output*, *Outcome*, *Impact*, *dan Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.
- Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (smart city) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
- 3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Lampiran I

Nomor : B-1384/DJAI/AI.01.04/12/2023

Tanggal: 4 Desember 2023

Kepada Yth.

1	Bupati Badung	29	Bupati Jember
2	Bupati Bandung	30	Bupati Jepara
3	Bupati Banjar	31	Bupati Karanganyar
4	Bupati Bantul	32	Bupati Karo
5	Bupati Banyuasin	33	Bupati Kebumen
6	Bupati Banyumas	34	Bupati Kendal
7	Bupati Banyuwangi	35	Bupati Klaten
8	Bupati Batang	36	Bupati Konawe Selatan
9	Bupati Belitung	37	Bupati Kudus
10	Bupati Belitung Timur	38	Bupati Kulon Progo
11	Bupati Blitar	39	Bupati Kutai Barat
12	Bupati Blora	40	Bupati Kutai Kartanegara
13	Bupati Bogor	41	Bupati Kutai Timur
14	Bupati Bojonegoro	42	Bupati Lamongan
15	Bupati Boyolali	43	Bupati Langkat
16	Bupati Buton	44	Bupati Lombok Barat
17	Bupati Cirebon	45	Bupati Lombok Tengah
18	Bupati Dairi	46	Bupati Lombok Timur
19	Bupati Deli Serdang	47	Bupati Lombok Utara
20	Bupati Demak	48	Bupati Luwu Timur
21	Bupati Gresik	49	Bupati Magelang
22	Bupati Grobogan	50	Bupati Malang
23	Bupati Gunungkidul	51	Bupati Manggarai
24	Bupati Halmahera Tengah	52	Bupati Manggarai Barat
25	Bupati Halmahera Timur	53	Bupati Manggarai Timur
26	Bupati Halmahera Utara	54	Bupati Mimika
27	Bupati Humbang Hasundutan	55	Bupati Minahasa
28	Bupati Indramayu	56	Bupati Minahasa Utara

57	Bupati Morowali	89	Bupati Temanggung
58	Bupati Muara Enim	90	Bupati Toba
59	Bupati Musi Banyuasin	91	Bupati Tuban
60	Bupati Ngada	92	Bupati Wakatobi
61	Bupati Pacitan	93	Bupati Wonogiri
62	Bupati Padang Pariaman	94	Bupati Wonosobo
63	Bupati Pakpak Bharat	95	Walikota Ambon
64	Bupati Paser	96	Walikota Balikpapan
65	Bupati Pasuruan	97	Walikota Banda Aceh
66	Bupati Pati	98	Walikota Bandung
67	Bupati Pelalawan	99	Walikota Banjarbaru
68	Bupati Pemalang	100	Walikota Banjarmasin
69	Bupati Probolinggo	101	Walikota Batu
70	Bupati Pulau Morotai	102	Walikota Bau Bau
71	Bupati Purwakarta	103	Walikota Bekasi
72	Bupati Purworejo	104	Walikota Binjai
73	Bupati Raja Ampat	105	Walikota Bogor
74	Bupati Samosir	106	Walikota Bontang
75	Bupati Semarang	107	Walikota Cilegon
76	Bupati Siak	108	Walikota Cimahi
77	Bupati Sidoarjo	109	Walikota Cirebon
78	Bupati Simalungun	110	Walikota Denpasar
79	Bupati Situbondo	111	Walikota Depok
80	Bupati Sleman	112	Walikota Jambi
81	Bupati Solok	113	Walikota Jayapura
82	Bupati Sragen	114	Walikota Kediri
83	Bupati Sukoharjo	115	Walikota Kupang
84	Bupati Sumbawa	116	Walikota Madiun
85	Bupati Sumenep	117	Walikota Magelang
86	Bupati Tabalong	118	Walikota Makassar
87	Bupati Tangerang	119	Walikota Malang
88	Bupati Tapanuli Utara	120	Walikota Manado

121	Walikota Mataram	132	Walikota Semarang
122	Walikota Medan	133	Walikota Sibolga
123	Walikota Padang	134	Walikota Sukabumi
124	Walikota Padang Panjang	135	Walikota Surabaya
125	Walikota Palembang	136	Walikota Surakarta
126	Walikota Pasuruan	137	Walikota Tangerang
127	Walikota Pekalongan	138	Walikota Tangerang Selatan
128	Walikota Pekanbaru	139	Walikota Tanjungpinang
129	Walikota Pontianak	140	Walikota Tomohon
130	Walikota Probolinggo	141	Walikota Yogyakarta
131	Walikota Samarinda		

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Semuel Abrijani Pangerapan

Lampiran II Nomor: B-1384/DJAI/AI.01.04/12/2023 Tanggal: 4 Desember 2023

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHAP II TAHUN 2023 PADA 141 KOTA/KABUPATEN PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) PERIODE TAHUN 2017-2021

NO		KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
1	KAB.	BADUNG	3,52	2,97	3,08	3,14	2,35		2,97	-0,29	REGULER
2	KAB.	BANDUNG	2,8	2,23	3,39	3,18	3,15		3,01	-0,06	REGULER
3	KAB.	BANJAR	3,48	2,29	2,93	1,26	2,4		2,42	-0,57	REGULER
4	KAB.	BANTUL	4	3,8	3,68	3,13	3,7	3	3,56	0,09	KPPN&IKN
5	KAB.	BANYUASIN	3,2	2,49	3,05	2,99	2,7		2,87	-0,08	REGULER
6	KAB.	BANYUMAS	3,88	3,23	3,63	3,14	3,33		3,42	0,32	REGULER
7	KAB.	BANYUWANGI	3,8	2,57	3,47	3,23	3,58		3,3	0,13	REGULER
8	KAB.	BATANG	3,8	3	3,38	3,44	3,58		3,4	0,13	REGULER
9	KAB.	BELITUNG	3,32	2,69	2,81	2,81	2,88	2,7	2,84	0,38	KPPN&IKN
10	KAB.	BELITUNG TIMUR	1,52	1,26	2,05	1	1,75	1	1,46	-0,37	KPPN&IKN
11	KAB.	BLITAR	3,76	2,6	3,47	3,21	3,57		3,29	0,1	REGULER
12	KAB.	BLORA	3,08	1,8	2,46	1,96	1,77		2,15	-0,37	REGULER
13	KAB.	BOGOR	3,6	2,66	3,23	3,13	3,08		3,1	-0,04	REGULER
14	KAB.	BOJONEGORO	3,24	3,06	3,16	2,86	3,08		3,07	-0,27	REGULER
15	KAB.	BOYOLALI	3,84	2,89	3,49	3,4	3,55	2,47	3,3	0,14	KPPN&IKN
16	KAB.	BUTON	1,92	1,63	2,29	2,8	1,73	0	1,88	-0,03	KPPN&IKN
17	KAB.	CIREBON	2,6	2,14	3,34	3,19	3,1		2,95	0,14	REGULER
18	KAB.	DELI SERDANG	3,44	2,63	3,25	3,12	3,8		3,23	-0,26	REGULER
19	KAB.	DEMAK	3,92	3,54	3,56	3,61	3,63	3,73	3,63	0,02	KPPN&IKN
20	KAB.	GRESIK	3,68	2,4	3,16	3,06	3,63		3,13	0,27	REGULER
21	KAB.	GROBOGAN	3,4	2,94	3,19	3,09	3,32		3,17	-0,05	REGULER
22	KAB.	GUNUNGKIDUL	3,84	3,94	3,44	3,36	3,77	3,7	3,66	0,15	KPPN&IKN
23	KAB.	HUMBANG HASUNDUT	2,52	2,26	2,2	1,94	1,98	1,97	2,13	0,5	KPPN&IKN
24	KAB.	INDRAMAYU	3,28	2,43	2,76	2,74	2,9		2,77	-0,14	REGULER
25	KAB.	JEMBER	3,24	2,23	2,82	2,73	2,62		2,69	0,16	REGULER
26	KAB.	JEPARA	3,84	3,6	3,3	2,64	3,52	2,03	3,2	-0,12	KPPN&IKN
27	KAB.	KARANGANYAR	1,76	2,03	2,75	2,99	3,05	1,17	2,46	-0,7	KPPN&IKN
28	KAB.	KARO	2,72	2,26	2,64	2,32	2,22	0	2,16	-0,2	KPPN&IKN
29	KAB.	KEBUMEN	4	3,03	3,54	3,05	3,48		3,37	0,15	REGULER
30	KAB.	KENDAL	4	3,09	3,58	3,59	3,63	2,73	3,45	0,14	KPPN&IKN
31	KAB.	KLATEN	3,92	3,49	2,93	3,34	3,07	2,07	3,17	0,31	KPPN&IKN
32	KAB.	KONAWE SELATAN	2,6	2,14	2,41	2,64	2,28	1,63	2,32	-0,18	KPPN&IKN
33	KAB.	KUDUS	3,36	2,83	3,64	3,35	3,73	2,6	3,31	0,44	KPPN&IKN
34	KAB.	KULON PROGO	3,84	3,26	3,24	3,09	3,32	3,53	3,32	0,11	KPPN&IKN
35	KAB.	KUTAI BARAT	1,4	1,09	1,88	1	1,48	0	1,23	-	KPPN&IKN
36	KAB.	KUTAI KARTANEGARA	3,6	2,89	2,92	2,59	3,32	1,2	2,82	0	KPPN&IKN
37	KAB.	KUTAI TIMUR	3,12	2,46	3,13	3,15	2,93		2,96	0,21	REGULER
38	KAB.	LAMONGAN	2,28	1,83	2,18	2,71	2,45		2,28	-0,8	REGULER
39	KAB.	LANGKAT	3,08	2,77	2,82	3,09	3,38		3	0,23	REGULER
40	KAB.	LOMBOK BARAT	3,36	3,74	3,27	2,61	2,43	1,73	2,92	-0,11	KPPN&IKN
41	KAB.	LOMBOK TENGAH	1,56	1,29	2,64	1,84	1,3	1	1,67	-0,7	KPPN&IKN

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
42	KAB. LOMBOK TIMUR	2,44	1,77	2,35	1,81	2,03	0	1,84	-0,49	KPPN&IKN
43	KAB. LOMBOK UTARA	3,44	2,46	3,02	3,05	3,25	0	2,7	0,17	KPPN&IKN
44	KAB. MAGELANG	3,04	2,17	3,39	2,53	3,1	2,67	2,81	-0,14	KPPN&IKN
45	KAB. MALANG	3,6	2,29	3,41	2,81	3,13	2,53	2,94	0,44	KPPN&IKN
46	KAB. MANGGARAI	3,2	2,4	2,8	2,99	2,45	2,17	2,67	0,57	KPPN&IKN
47	KAB. MANGGARAI BARAT	3,52	2,23	2,9	3,09	2,45	1,8	2,67	0,48	KPPN&IKN
48	KAB. MANGGARAI TIMUR	2,24	1,86	2,37	2,44	2,42	1,7	2,21	-0,3	KPPN&IKN
49	KAB. MIMIKA	3,36	2,57	2,14	2,71	2,17		2,47	-0,03	REGULER
50	KAB. MINAHASA UTARA	1,6	1,14	2,43	1,55	2,1	1,33	1,74	0,06	KPPN&IKN
51	KAB. MOROWALI	2,6	2,26	2,71	2,83	2,3		2,55	-0,11	REGULER
52	KAB. MUARA ENIM	2,56	2,51	2,82	2,92	2,45		2,68	-0,41	REGULER
53	KAB. MUSI BANYUASIN	2,8	2,46	2,73	2,73	1,83		2,5	-0,67	REGULER
54	KAB. PACITAN	2,2	1,74	2,91	1,21	2,37	1,03	1,97	-0,38	KPPN&IKN
55	KAB. PADANG PARIAMAN	3,56	3,14	3,05	3,07	3,43		3,2	0,11	REGULER
56	KAB. PAKPAK BHARAT	2,88	1,91	2,24	3,19	1,9	1,2	2,26	0,25	KPPN&IKN
57	KAB. PASER	3,96	2,66	2,82	3,11	2,52	2,23	2,84	-0,03	KPPN&IKN
58	KAB. PASURUAN	2,64	1,71	3,07	2,88	3,05	2,6	2,67	-0,17	KPPN&IKN
59	KAB. PATI	3,36	2,06	3,15	2,69	3,05		2,84	0,17	REGULER
60	KAB. PELALAWAN	2,64	1,97	2,46	1,36	1,83		2,03	-0,46	REGULER
61	KAB. PEMALANG	2,96	2,29	2,58	2,41	2,25		2,46	0,24	REGULER
62	KAB. PROBOLINGGO	2,6	2,23	2,77	2,74	2,07	2,4	2,46	-0,15	KPPN&IKN
63	KAB. PULAU MOROTAI	2,2	1,8	2,58	2,71	2,43	1,47	2,27	0,32	KPPN&IKN
64	KAB. PURWAKARTA	3,88	2,77	3,13	2,33	3,05		2,96	-0,01	REGULER
65	KAB. PURWOREJO	2,52	2,2	2,79	2,9	2,12	0	2,25	0,37	KPPN&IKN
66	KAB. RAJA AMPAT	1,44	1,23	1,17	1	1,2	1	1,16	-0,1	KPPN&IKN
67	KAB. SEMARANG	2,84	2,69	2,63	2,64	2,17	2	2,51	0,09	KPPN&IKN
68	KAB. SIAK	2,8	2,29	2,76	3,13	3,07		2,81	0,18	REGULER
69	KAB. SIDOARJO	2,68	2,37	3,04	3,23	3,53		3,01	0,18	REGULER
70	KAB. SIMALUNGUN	1,68	1,06	2,09	1,26	1,67	1	1,48	-0,06	KPPN&IKN
71	KAB. SITUBONDO	3,76	3	3,13	3,04	2,75		3,07	-0,26	REGULER
72	KAB. SLEMAN	3,44	2,97	3,15	3,24	3,02	2,2	3,04	-0,22	KPPN&IKN
73	KAB. SOLOK	3,36	2,66	2,81	2,99	2,55		2,82	-0,06	REGULER
74	KAB. SRAGEN	4	3,34	3,5	3,13	3,33	3,13	3,37	0,18	KPPN&IKN
75	KAB. SUKOHARJO	4	3,29	3,55	3,72	3,77	1,8	3,45	-0,16	KPPN&IKN
76	KAB. SUMBAWA	3,6	2,54	2,81	2,86	3,32		2,95	-0,04	REGULER
77	KAB. SUMENEP	3,48	2,66	2,84	3,17	3,38		3,04	0,3	REGULER
78	KAB. TABALONG	3,76	3,2	3,17	3,59	3,47		3,38	0,26	REGULER
79	KAB. TANGERANG	3,88	3,26	3,44	2,74	3,67		3,35	0,12	REGULER
80	KAB. TAPANULI UTARA	2,84	2,31	2,77	2,59	2,07	1	2,33	0,52	KPPN&IKN
81	KAB. TEMANGGUNG	2,92	3,14	3,52	3,12	3,13	3	3,17	0,06	KPPN&IKN
82	КАВ. ТОВА	3,08	2,11	2,28	2,59	2,35	0	2,17	0,89	KPPN&IKN
83	KAB. TUBAN	3,44	2,03	3,11	2,72	2,53		2,73	0,28	REGULER
84	KAB. WAKATOBI	1,6	1,23	2,02	1,4	1,88	1,43	1,61	-	KPPN&IKN
85	KAB. WONOGIRI	4	3,29	3,59	3,11	3,75	3,67	3,52	0,22	KPPN&IKN
86	KAB. WONOSOBO	3,6	2,51	2,93	3,14	2,47	2	2,77	-0,02	KPPN&IKN
87	KOTA AMBON	3,08	2,6	2,84	2,96	2,97		2,87	-0,03	REGULER
88	KOTA BALIKPAPAN	4	3	3,55	3,31	3,63	3,07	3,41		KPPN&IKN
	KOTA BANDA ACEH			2,13		2,7		2,4	·	REGULER
88	KOTA BALIKPAPAN		3	3,55	3,31	3,63	3,07	3,41	0,31	KPPN&I

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
90	KOTA BANDUNG	3,96	3,89	3,68	3,77	3,98		3,83	-0,06	REGULER
91	KOTA BANJARBARU	2,36	2,03	2,4	2,03	2,33		2,23	-0,5	REGULER
92	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,06	3,36	3,21	3,32		3,31	0,25	REGULER
93	KOTA BATU	2,4	1,89	2,84	2,59	1,65	2,4	2,27	-0,57	KPPN&IKN
94	KOTA BEKASI	3,48	2,86	3,27	3,04	3,48		3,21	0,3	REGULER
95	KOTA BINJAI	2,88	2,31	2,99	2,52	1,97		2,55	-0,07	REGULER
96	KOTA BOGOR	3,72	3	3,21	3,21	3,85		3,35	-0,1	REGULER
97	KOTA BONTANG	2,2	1,86	2,62	2,7	2,48		2,41	-0,69	REGULER
98	KOTA CILEGON	2,12	2	2,4	2,71	2,2		2,31	-0,09	REGULER
99	KOTA CIMAHI	3,96	3,11	3,52	3,48	3,7		3,51	0,03	REGULER
100	KOTA CIREBON	3,4	2,74	3,05	2,79	2,93		2,95	-0,19	REGULER
101	KOTA DENPASAR	3,96	2,54	3,53	3,52	3,82		3,43	-0,17	REGULER
102	KOTA DEPOK	3,88	3,54	3,28	3	3,63		3,41	0,02	REGULER
103	KOTA JAMBI	3,92	3,26	3,68	3,24	3,43		3,48	0,37	REGULER
104	KOTA JAYAPURA	1,28	1	1,95	1,29	2,3		1,63	-0,69	REGULER
105	KOTA KEDIRI	3,68	2,69	3,21	3,24	3,4		3,2	-0,12	REGULER
106	KOTA KUPANG	2,64	1,54	2,67	3	2,78		2,53	-0,35	REGULER
107	KOTA MADIUN	3,8	3,17	3,72	4	3,9		3,71	0,08	REGULER
108	KOTA MAGELANG	2,56	2,4	3,12	2,94	2,83	1,13	2,63	-0,52	KPPN&IKN
109	KOTA MAKASSAR	2,84	2,23	3,28	3,31	3,82		3,14	0,55	REGULER
110	KOTA MALANG	3,36	2,51	3,34	2,58	3,27	2,53	2,93	-0,01	KPPN&IKN
111	KOTA MANADO	3,84	2,6	2,92	3,4	2,8		3,02	-0,1	REGULER
112	KOTA MATARAM	3,64	3,26	3,5	2,9	3,37	2,37	3,21	0,38	KPPN&IKN
113	KOTA MEDAN	2	1,57	2,13	1,49	1,58		1,77	-0,99	REGULER
114	KOTA PADANG	3,48	2,8	3,33	2,87	2,95		3,07	0,58	REGULER
115	KOTA PADANG PANJANG	3,2	2,11	2,59	2,61	1,83		2,41	-0,39	REGULER
116	KOTA PALEMBANG	2,92	2,06	3,2	3,56	2,85		2,95	0,52	REGULER
117	KOTA PASURUAN	3,88	3	3,24	3,15	2,72	3,53	3,16	0,18	KPPN&IKN
118	KOTA PEKANBARU	3,36	3,17	2,96	2,87	2,55		2,94	-0,47	REGULER
119	KOTA PONTIANAK	3,6	3,11	3,35	3,03	3,75		3,34	-0,05	REGULER
120	KOTA PROBOLINGGO	3,36	3,26	3,27	2,33	2,02	1,7	2,68	-0,45	KPPN&IKN
121	KOTA SAMARINDA	3,52	2,97	3,28	3,18	3,45	1,73	3,1	-0,2	KPPN&IKN
122	KOTA SEMARANG	3,52	3,74	3,73	3,41	3,77	3,6	3,64	-0,11	KPPN&IKN
123	KOTA SIBOLGA	2,24	1,89	2,18	2,36	1,9		2,11	-0,05	REGULER
124	KOTA SURABAYA	3,96	3	3,78	3,89	3,73		3,65	0,25	REGULER
125	KOTA SURAKARTA	4	3,89	3,76	3,99	3,88	3,33	3,84	0,04	KPPN&IKN
126	KOTA TANGERANG	3,6	2,6	3,47	2,99	2,88		3,1	0,05	REGULER
127	KOTA TANGERANG SELATA	2,56	2,37	3,26	2,97	3,37		2,98	0,26	REGULER
128	KOTA TANJUNG PINANG	2,72	1,91	2,41	1,97	1,88		2,15	-0,63	REGULER
129	кота томоном	3,32	2,54	2,8	2,85	2,28		2,71	-0,02	REGULER
130	KOTA YOGYAKARTA	4	3,14	3,47	3,84	3,67	3,52	3,58	-0,06	KPPN&IKN

DAFTAR KAB/KOTA YANG TIDAK MENGIKUTI EVALUASI SMART CITY TAHAP 2 TAHUN 2023

NO	WILAYAH	BASELINE	ОИТРИТ	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	KETERANGAN	Column1
1	KAB. DAIRI	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
2	KAB. HALMAHERA TENGAH	0	0	0	0	0		0	KPPN IKN	
3	KAB. HALMAHERA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
4	KAB. HALMAHERA UTARA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
5	KAB. LUWU TIMUR	0	0	0	0	0		0	REGULER	
6	KAB. MINAHASA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
7	KAB. NGADA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
8	KAB. SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
9	KOTA BAU BAU	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN	
10	KOTA PEKALONGAN	0	0	0	0	0		0	REGULER	
11	KOTA SUKABUMI	0	0	0	0	0		0	REGULER	

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2023 66 Kota/Kabupaten

pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Gambaran Umum

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menginisiasi Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (Smart City) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden untuk menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Pada periode tahun 2017 s.d. 2019, sebanyak 100 (seratus) kota dan kabupaten menerima pendampingan dari para ahli dalam pembuatan masterplan dan penerapan konsep Kota Cerdas (Smart City). Program ini kemudian berkembang menjadi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City). Pada tahun 2021, program ini berfokus pada 48 (empat puluh delapan) kota dan kabupaten yang berada dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN). Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 50 (lima puluh) kota dan kabupaten lainnya menerima pendampingan penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City). Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun.

Selanjutnya, guna mengawal jalannya pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan juga mengindentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City), maka sejak tahun 2018 telah dilakukan proses evaluasi terhadap implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun pemerintah kota dan kabupaten. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 6 (enam) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kota atau kabupaten.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

- 1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
- 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPIMD:
- 3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
- 4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Secara khusus, bagi kota dan kabupaten yang berada pada 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) & Kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN), evaluasi juga dilakukan untuk mengkonfirmasi keterlaksanan program kolaborasi antar kota/kabupaten dalam pengembangan kawasan serta keterlaksanan program mandiri yang memiliki kontribusi bagi pembangunan KPPN dan IKN.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (output), hasil yang diperoleh (outcome), dampak yang dirasakan

oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (self-assessment) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program		Perencanaan	Ketersedian dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
		Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
Hasil program Kota Cerdas (Smart City)	20%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
(Outcome)		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi

Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	20%	Hasil Survei	Pengukuran dampak implementasi program pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City) melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.	
Program Quick Win	20%	Pelaksanaan Manajemen Risiko	Perumusan, pelaksanan dan keberlanjutan Quick Win Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win	
Program Kolaborasi	10%	Pelaksanaan	Jumlah program kolaborasi antar kota/kabupaten atau program kontribusi mandiri kota/kabupaten yang dilaksanakan pada setiap dimensi Kota Cerdas (Smart City) untuk pengembangan KPPN dan IKN	

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City); Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi;
- Kolaborasi antar kota/kabupaten atau program kontribusi mandiri kota/kabupaten yang dilaksanakan pada setiap dimensi Kota Cerdas (Smart City) untuk pengembangan KPPN dan IKN

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023

A. Baseline

	No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
	1 1	Perencanaan	1.1 Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1.1.1 Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	3,00
			1.2 Aktivitas Dewan Smart City	1.2.1 Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	3,00

		1.3 Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	1.3.1 Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	4,00
2	Realisasi	1.1 Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	1.1.1 Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	4,00
2		1.2 Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	1.2.1 Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	4,00
			Rata-Rata	3,60

B. Output

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Kebijakan Smart City	2.1 Ketersediaan Peraturan Smart city	2.1.1 Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah tersedia setelah Daerah Anda menjalani Program Gerakan Menuju Smart city?	3,00
	Kelembagaan Smart city	2.1 Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	2.1.1 Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	2,80
		2.2 Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	2.2.1 Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	2,80
2		2.3 Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	2.3.1 Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	3,40
		2.4 Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	2.4.1 Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	2,00

			Rata-Rata	2,29	
		2.2 Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	2.2.1 Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	1,00	
3	Anggaran Smart City	2.1 Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	2.1.1 Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	1,00	

C. Outcome

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
		3.1 Program Smart Governance di tahun berjalan	3.1.1 Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	3,80
		3.2 Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.2.1 Sejauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4,00
		3.3 Penyelenggaraan	3.3.1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	1,00
1	Program	Pemerintahan Daerah	3.3.2 Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	1,80
·	T rogram	3.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.4.1 Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3,00
		3.5 Inovasi Pelayanan Publik 3.6 Program Smart Branding di tahun berjalan	3.5.1 Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	3,60
			3.6.1 Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	3,00
		3.7 Kemudahan Berusaha	3.7.1 Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	3,80

	3.7.2. Sejauh mana realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir? (data pertumbuhan realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir)	4,00
3.8 Wajah Kota	3.8.1 Sejauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	
3.9 Program Smart Economy di tahun berjalan	3.9.1 Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	4,00
3.10.Kesejahteraan	3.10.1 Sejauh mana persentase penduduk miskin pada (Tahun Terakhir)?	3,00
Masyarakat	3.10.2 Sejauh mana IPM di daerah Anda pada (Tahun Terakhir)?	3,00
3.11 Program Smart Living di tahun berjalan	3.11.1 Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	3,80
	3.12.1 Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3,00
3.12 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	3.12.2 Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	3,80
	3.12.3 Sejauh mana cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	3,00
3.13 Pelayanan Dasar Publik	3.13.1 Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan aksses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	4,00
Bidang Infrastruktur	3.13.2 Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga) dalam 1 tahun terakhir?	4,00

			3.13.3 Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan) dalam 1 tahun terakhir?	3,20
		3.14 Program Smart Society di tahun berjalan	3.14.1 Sejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	3,00
		3.15 Pelayanan	3.15.1 Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)?	4,00
		Dasar Publik Bidang Pendidikan	3.15.2 Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)?	4,00
			3.16.1 Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	3,80
		3.16 Kebencanaan	3.16.2 Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	4,00
			3.16.3 Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	4,00
		3.17 Program Smart Environment di tahun berjalan	3.17.1 Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	3,00
		3.18 Pengelolaan	3.18.1 Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	3,00
		Sampah	3.18.2 Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah?	4,00
2	Rencana Aksi	3.1 Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	3.1.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3,00
2		3.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur	3.2.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3,60

Pendukung Smart city		
3.3 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	3.3.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3,80
3.4 Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	3.4.1 Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	4,00
1	Rata-rata	3,41

D. Impact

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
			4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dapat diakses secara daring/online?	2,80
		4.1 Sub Dimensi: Layanan Publik (Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas?	2,80
1	Smart Governance		4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah?	2,80
		4.2 Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan	4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program?	2,80
	(diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)		4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan	2,80

			kebijakan/layanan/program sudah tersedia?	
			4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masukan dari masyarakat terkait kebijakan/layanan/program telah direspon sesuai standar waktu yang ditentukan?	2,80
			4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat keterbukaan informasi tentang program dan seluruh aktivitas pemerintah daerah?	2,80
		4.3 Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi?	2,80
			4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya?	2,80
		4.1 Sub Dimensi: Membangun dan	4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kota/kabupaten saya memiliki destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung?	2,80
2	Smart Branding	Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring sudah tersedia?	2,80
			4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan rekreasi dan fasilitas	2,80

	budaya dapat dipesan secara daring?	
	4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online/daring sudah tersedia?	2,80
4.2 Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah menyediakan berbagai program insentif untuk kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi?	2,80
	4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal sudah tersedia?	2,80
	4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama,dsb) dengan ciri khas daerah?	2,80
4.3 Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah memiliki visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah?	2,80
	4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota/kabupaten saya telah dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten?	2,80

		4.1 Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2,80
			4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	2,80
			4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pemerintah daerah telah memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri?	2,80
3	Smart Economy		4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online sudah tersedia?	2,80
		4.2 Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare) 4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sudah tersedia? 4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital sudah tersedia?	terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran	2,80
			terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital	2,80
		4.3 Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan	4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online sudah tersedia?	2,80
		(Transaction)	4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran non-tunai	2,80

				(QRIS, dompet digital, dsb) sudah tersedia?	
				4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan sudah tersedia?	2,80
				4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring/online?	2,80
			4.1 Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tempat tinggal saya sudah layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)?	2,80
	4	Smart Living		4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai sudah tersedia?	3,60
		4.2 Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)		4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online sudah tersedia?	3,80
			Prasarana	4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi riwayat kesehatan saya dapat saya akses secara daring/online?	2,80
				4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan telemedicine atau layanan	2,80

			kunjungan kesehatan ke rumah sudah tersedia?	
			4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai seluruh wilayah kabupaten/kota saya memiliki akses internet dan telekomunikasi yang memadai?	3,60
		4.3 Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb) sudah tersedia?	2,80
			4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota/kabupaten sudah tersedia?	2,80
			4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat berbagai komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang?	2,80
5	Smart Society	4.1 Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb?	2,80
			4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis?	2,80

			4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan?	2,80
		4.2 Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (elibrary), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat?	2,80
			4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu?	2,80
			4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif?	2,80
		4.3 Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif?	2,80
			4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat?	2,80
6	Smart Environment	4.1 Sub Dimensi: Program Proteksi	4.1.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai alat pemantauan dan pengendalian	2,80

Lingkungan (Proteksi)	kualitas udara/air/tanah/hutan sudah tersedia?	
	4.1.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat upaya pengurangan pencemaran udara/air/tanah/hutan yang dikelola secara terpadu?	2,80
	4.1.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai telah terjadi perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan?	2,80
	4.2.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu sudah tersedia?	2,80
4.2 Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah Sampah/Limbah)	4.2.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta telah berjalan?	2,80
	4.2.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, danRecycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst?	1,80
4.3 Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	4.3.1 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW saya telah terpenuhi dan kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW saya tidak pernah/semakin berkurang?	2,80

Rata-rata	2,81
4.3.3 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah?	2,80
4.3.2 Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro)?	1,80

E. Quick Wins

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1	Perumusan inovasi	5.1 Perumusan inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	3,80
2	Daya tarik inovasi	5.1 Daya tarik inovasi	5.1.1 Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	3,00
3	Manfaat inovasi	5.1 Manfaat inovasi	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	3,00
4	Keunikan inovasi	5.1 Keunikan inovasi	5.1.1 Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	3,00
5	Peluang kemitraan	5.1 Peluang kemitraan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	2,40

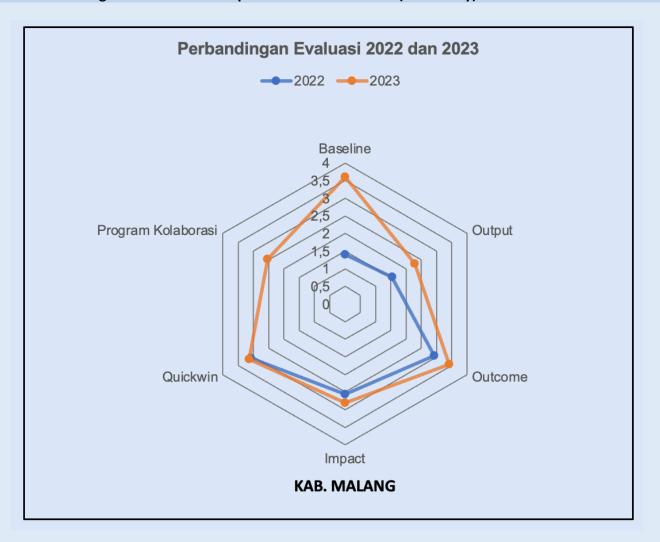
6	Potensi pengembangan	5.1 Potensi pengembangan	5.1.1 Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	2,60
7	Keberlangsungan	5.1 Keberlangsungan	5.1.1 Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	2,80
8	Sumber daya	5.1 Sumber daya	5.1.1 Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan menjalankan inovasi quick wins tersedia?	3,00
9	Manajemen Risiko	5.1 Identifikasi risiko	5.1.1 Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	3,80
		5.2 Mitigasi risiko	5.2.1 Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	4,00
10	Keberlanjutan	5.1 Keberlanjutan	5.1.1 Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	3,00
			5.1.2 Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	3,20
		3,13		

F. Kolaborasi

No	Indikator	Subindikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
1 Program	6.1 Program Kolaborasi Dimensi Smart Governance	6.1.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart governance yang sudah berjalan?	3,80	
		6.2 Program Kolaborasi Dimensi Smart Branding	6.2.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan	1,80

	kawasan pada dimensi smart branding yang sudah berjalan?	
	0.04 A	
6.3 Program Kolaborasi Dimensi Smart Economy	6.3.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart economy yang sudah berjalan?	1,80
6.4 Program Kolaborasi Dimensi Smart Living	6.4.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart living yang sudah berjalan?	2,80
6.5 Program Kolaborasi Dimensi Smart Society	6.5.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart society yang sudah berjalan?	1,80
6.6 Program Kolaborasi Dimensi Smart Environment	6.6.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart environment yang sudah berjalan?	3,20
Rata-rata		
	Kolaborasi Dimensi Smart Economy 6.4 Program Kolaborasi Dimensi Smart Living 6.5 Program Kolaborasi Dimensi Smart Society 6.6 Program Kolaborasi Dimensi	Kolaborasi Dimensi Smart Economy Mapikota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart economy yang sudah berjalan? 6.4 Program Kolaborasi Dimensi Smart Living 6.5 Program Kolaborasi Dimensi Smart Society 6.5 Program Kolaborasi Dimensi Smart Society 6.6.1 Apakah terdapat program kolaborasi bersama kota/kabupaten dalam satu kawasan atau program yang berkontribusi (hanya dilakukan secara mandiri oleh 1 kab/kota) kepada pengembangan kawasan pada dimensi smart living yang sudah berjalan? 6.5 Program Kolaborasi Dimensi Smart Society 6.6 Program Kolaborasi Dimensi Smart Environment 6.6 Program Kolaborasi Dimensi Smart Environment 6.7 Program Kolaborasi Dimensi Smart society yang sudah berjalan? 6.8 Program Kolaborasi Dimensi Smart society yang sudah berjalan? 6.9 Program Kolaborasi Dimensi Smart society yang sudah berjalan? 6.9 Program Kolaborasi Dimensi Smart society yang sudah berjalan?

Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022 dan 2023



Kelemahan dan Kekuatan

KELEMAHAN

- 1. Windy Gambetta, Akademisi Institut Teknologi Bandung:
 - a. Terlalu berfokus pada aplikasi sementara Smart City bukan hanya TI tapi semua sisi pembangunan.
 - b. Banyak nilai kuesioner yang perlu divalidasi lebih lanjut contoh smart living hanya membahas satu aplikasi (satu sub dimensi) sementara nilai diberikan untuk berberapa sub lainnya. Contoh lain, aplikasi baru memiliki 30an pengguna tapi mendapat responden sebanyak 50.
 - c. Dampak SC perlu diukur dari pemanfaatan program SC oleh masyarakat bukan hanya 'pengembang' aplikasi
 - d. Nilai dimensi tertentu (misalnya Lingkungan) masih terbatas dampaknya
- 2. Lukito Edi Nugroho, Akademisi Universitas Gadjah Mada:
 - a. Responden survei kurang tepat, ada ketidaksesuaian antara pertanyaan dan target respondennya.
 - b. Payung hukum untuk smart city belum disahkan.
 - c. Program-program kolaborasi masih belum berjalan seperti yang diharapkan.
 - d. Fungsi Dewan Smart City dan keterlibatan pihak eksternal masih belum signifikan.
- 3. Dyah Mutiarin, Akademisi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta:
 - a. Belum ada dasar hukum smart city.
 - b. Kurangnya sinergi antar OPD dalam pelaksanaan smart city.

c. Kolaborasi antara Pelaksana Smart City dengan Dewan Smart City dan Forum Smart City masih belum optimal.4. Pendanaan dari Non- APBD masih terbatas.

4. Hari Kusdaryanto, Citiasia:

- a. Evaluasi smart city tahunan hendak melihat keselarasan antara implementasi program, kegiatan, serta rencana aksi dengan apa yang sudah ditulis di masterplan, maka penyajian materi evaluasi seyogyanya berujuk kepada dokumen Masterplan.
- b. Evaluasi dampak seyogyanya dijawab oleh responden yang sudah dipilih dan pernah mengalami layanan/inovasi baru (sebagai pengguna), sehingga bisa memberikan penilaian sebelum dan sesudah layanan smart city pemerintah daerah
- c. Luasnya wilayah, membutuhkan anggaran yang besar khususnya untuk penyediaan infrastruktur pendukung smart city, masih ada gap antar wilayah
- d. Utilisasi atas inovasi inovasi / layanan smart city berbasis digital oleh warga belum optimal

5. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Indonesia (IKTII):

- a. Keluhan kesulitan melakukan survey, karena 1 responden harus menjawab 3 subdimensi, tetapi pada kenyataan responden tersebut tidak memanfaatkan semua quickwin dari 3 subdimensi
- b. Pertanyaan pada survey 6 dimensi mempunyai kecenderungan salah persepsi dari responden, yang mana mereka berpikir quick win tersebut baru rencana, padahal ditanyakan kepada yang sudah memanfaatkan quickwin tersebut. Contoh pada Smart Branding dengan responden Peternak lele menjawab dengan nilai 4 untuk masing- masing pertanyaan dari 9 pertanyaan dari 3 subdimensi Dimensi Smart Branding.
- c. Pada saat survey dilakukan, OPD terkait tidak melakukan pendampingan sehingga responden kurang tepat dan maksud dari survey kurang/tidak tercapai.Contoh:
 - i. Peternak Lele menjadi responden untuk Smart Branding memberi nilai 4 untuk 9 pertanyaan dari 3 subdimensi. Ini menunjukkan kurang fahamnya responden untuk pertanyaan tersebut.
 - ii. 50 responden yang sama menjadi responden Smart Governace sekaligus menjadi responden Smart Economy.
 - iii. 2 orang responden yang pekerjaannya sebagai Pegawai kontrak menilai 0 untuk beberapa pertanyaan dari 9 subdimensi baik Smart Governance dan Smart Economy. Hal ini menunjukkan bahwa 2 orang ini bukan responden yang tepat bahkan tidak faham, sayangnya dijadikan responden untuk 2 quick win dari 2 dimensi Smart City yaitu Smart Governance dan Smart Economy.
 - iv. Pada survey quickwin Smart Environment ada 9 responden mengisi 0 untuk subdimensi Energi. Ini menunjukkan bahwa responden bukan target sasaran yang tepat.
 - v. Pada Dimensi Smart Environment terbanyak responden mengisi nilai 0.4.
 - vi. Nilai survey Smart Environment paling rendah dibanding 5 dimensi yang lain. Nilai rata-rata untuk Smart Environment adalah 2,69. Dalam hasil survey kolom Layanan/program quick win tidak diisi. Namun nilai tertinggi dari 3 subdimensi adalah Sub dimensi Protection yaitu 2,755. Banyak sekali aplikasi

KEKUATAN

- 1. Windy Gambetta, Akademisi Institut Teknologi Bandung:
 - a. Banyak implementasi aplikasi di Kab Malang.
 - b. Kolaborasi dengan Pemda sekitar sudah berlangsung dan terdapat berbagai program kerjasama.Beberapa dimensi sudah mulai terasa dampaknya bagi masyarakat.
- 2. Lukito Edi Nugroho, Akademisi Universitas Gadjah Mada:
 - Dokumentasi dan data dukung sudah cukup baik. Program-program dan rencana-rencana aksi sebagian besar sudah berjalan. Quick win cukup menyentuh kepentingan masyarakat.
- 3. Dyah Mutiarin, Akademisi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta:
 - a. E-Agriprop (Quickwin Solution) mendukung agriculture.

- b. Aplikasi Siharkepo (sistem informasi harga & kebutuhan pokok bertujuan untuk menginformasikan harga bahan pokok ke masyarakat dan memantau kestabilan harga bahan pokok di Kabupaten Malang), aplikasi ini bagus untuk kestabilan harga.
- c. Program smart economy, smart living, dan smart environment memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

4. Hari Kusdaryanto, Citiasia:

- a. Evaluasi smart city tahunan hendak melihat keselarasan antara implementasi program, kegiatan, serta rencana aksi dengan apa yang sudah ditulis di masterplan, maka penyajian materi evaluasi seyogyanya berujuk kepada dokumen Masterplan.
- b. Evaluasi dampak seyogyanya dijawab oleh responden yang sudah dipilih dan pernah mengalami layanan/inovasi baru (sebagai pengguna), sehingga bisa memberikan penilaian sebelum dan sesudah layanan smart city pemerintah daerah
- c. Luasnya wilayah, membutuhkan anggaran yang besar khususnya untuk penyediaan infrastruktur pendukung smart city, masih ada gap antar wilayah
- d. Utilisasi atas inovasi inovasi / layanan smart city berbasis digital oleh warga belum optimal
- 5. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Indonesia (IKTII):
 - a. Kab Malang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - b. Kab Malang akan melakukan kerjasama dengan Kota Malang, yang mana air bersih untuk Kota Malang mengambil dari Kab Malang.
 - c. Kab Malang akan melakukan kerjasama dalam hal stunting Kab Malang telah memiliki Sistem Mitigasi, penanganan saat bencana dan pemulihan bencana
 - d. Berdasarkan hasil survey nilai rata-rata per dimensi yang tertinggi adalah Quickwin Smart Living dengan nilai rata-rata 3,30.

Rekomendasi

- 1. Windy Gambetta, Akademisi Institut Teknologi Bandung:
 - a. Perlu redefinisi program/ kegiatan Smart City sesuai definisi Smart City yaitu program inovatif, kolaboratif, partisipatif. Bukan terbatas pada pengembangan aplikasi atau Teknologi Informasi. Perbaikan pengambilan sampel yang lebih valid. Peningkatan sosialisai program Smart City sehingga masyarakat lebih paham dan bisa ikut terlibat dalam pengembangannya.
- 2. Lukito Edi Nugroho, Akademisi Universitas Gadjah Mada:
 - a. Perlu ada kecocokan antara survei dan respondennya.
 - b. Peraturan bupati tentang smart city perlu segera dipercepat pengesahannya. Pelibatan DSC dan stakeholders eksternal perlu ditingkatkan.
- 3. Dyah Mutiarin, Akademisi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta:
 - a. Segera menyusun dasar hukum smart city.
 - b. Memperkuat sinergi antar OPD dalam pelaksanaan smart city.
 - c. Meningkatkan kolaborasi antara Pelaksana Smart City dengan Dewan Smart City dan Forum Smart City.
 - d. Meningkatkan pendanaan dari Non-APBD dengan memetakan potensi CSR perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta dan mengenali karakter target serta potensi target CSR, supaya ada mutual kolaborasi untuk smart city.
- 4. Hari Kusdaryanto, Citiasia:
 - a. Masterplan adalah living document, silakan merevisi secara berkala menyesuaikan dengan kebijakan terkini (misal RPJMD baru, PP Perkotaan, Perpres Arsitektur SPBE, SNI ISO Kota Cerdas, dsb), serta bila ada inovasi baru (quickwins) yang diusulkan. Dan harus terus disosialisasikan ke multistakeholder, tidak hanya menjelang evaluasi.

- b. Mulai melihat ke Indikator SNI 37122 untuk menyusun program kegiatan jangka menengah dan panjang, sekaligus antisipasi PP 59/2022, yang sudah memandatkan bahwa pelaksanaan Kota Cerdas akan mengacu kepada SNI.
- c. Melanjutkan program kerjasama di Malang Raya, khususnya untuk isu Lingkungan (termasuk persampahan dan penanggulangan bencana) dan Pengembangan/Utilisasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari (sillicon valley nya Jawa Timur) sebagai ekosistem kolaborasi dan kokreasi yang pentahelix.
- 5. Lolly Amalia Abdullah, Ikatan Konsultan Teknologi Indonesia (IKTII):
 - a. Ranperbup agar segera diproses untuk diterbitkan, supaya Master Plan Smart City memiliki payung hukum
 - b. Disarankan agar Dewan Smart City melibatkan pihak eksternal sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Pembentukan Dewan Smart City dalam rapat-rapat Dewan Smart City supaya inovasi dan quick yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya.oleh masyarakat.
 - c. Untuk inovasi daerah agar merujuk PP No 38 tahun 2017, tidak mengembangkan aplikasi sendiri, tetapi menggunakan aplikasi dari pemerintah Pusat, kecuali aplikasi tersebut unik dan hanya digunakan oleh Kab Malang.
 - d. Disarankan untuk melakukan survey kepada responden yang memanfaatkan atau menggunakan Quick Win dari 6 dimensi Smart City. Tujuan survey adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang manfaat Quick win dari 6 dimensi Smart City.
 - e. Hasil survey disarankan untuk dianalisis agar manfaat quickwin benar-benar dirasakan oleh pengguna atau quickwin tersebut tidak dibutuhkan. Dengan demikian quickwin dapat dievaluasi untuk dilanjutkan dan dikembangkan jika bermanfaat, tetapi dapat juga quickwin itu tidak dilanjutkan, karena tidak memiliki nilai manfaat.
 - f. Disarankan agar Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Perjanijian Kerja Sama yang dilbuat hendaknya lebih spesifik yang bertujuan memberikan nilai tambah dan dampak yang signifikan sebagai Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional.
 - g. Interoperabilitas antar apliasi yang begitu banyak perlu diperhatikan. Oleh karena itu disarankan kepada Kabupaten Malang untuk membuat super app.